



**BUPATI BEKASI**

**PERATURAN BUPATI BEKASI**

Nomor : 62 Tahun 2015

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah perlu adanya ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

### PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai Penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
- e. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Kabupaten Bekasi;
- f. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bekasi;
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- h. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- i. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
- j. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi berkaitan dengan pelayanan dasar;
- k. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
- l. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Kesenian yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
- m. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- n. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa Masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar;

- o. Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan;
- p. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Penerapan SPM Bidang Pendidikan Dasar dijadikan acuan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam menjamin pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat Bidang Pendidikan Dasar.
- (2) Penerapan SPM Bidang Pendidikan Dasar disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Pendidikan Dasar.
- (3) Penerapan SPM Bidang Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

## **BAB III**

### **PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN**

#### **STANDAR PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR**

#### **Pasal 3**

- (1) Penerapan SPM Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) merupakan target pelayanan dasar Bidang Pendidikan, yang meliputi :
  - a. Jenis pelayanan dasar;
  - b. Indikator kinerja;
  - c. Nilai SPM;
  - d. Target tahunan; dan
  - e. Satuan kerja penanggung jawab.
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
  - a. Pelayan pendidikan dasar;
  - b. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai indikator dan target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, c, d dan e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis operasional penerapan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Rencana Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah.
- (2) Rencana Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan tolak ukur tingkat prestasi karya pelayanan dasar pendidikan dasar.
- (3) Rencana Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar.
- (4) Target tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 5**

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melakukan perencanaan pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

Jenis pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi penanggungjawab sesuai kemampuan, kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah.

### **BAB IV**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggungjawab penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar kepada Bupati setiap 6 (Enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

#### **Pasal 8**

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SPM Bidang Pendidikan Dasar serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah.
- (2) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Pemberian Orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
  - b. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Pendidikan Dasar, termasuk kesenjangan pembiayaan;
  - c. Penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar;
  - d. Penilaian Prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar; dan
  - e. Pelaporan Prestasi Kerja pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar Kepada pemerintah melalui gubernur.
- (3) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil dan keuangan daerah.

### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 9**

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Bidang Pendidikan Dasar yang dilakukan oleh Aparatur SKPD berdasarkan SPM Bidang Pendidikan Dasar;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang membidangi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar.

### **BAB VI**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 10**

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah dibebankan kepada APBD Kabupaten Bekasi.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Bekasi.

**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 DESEMBER 2015

a — **BUPATI BEKASI,**

  
**Hj. NENENG HASANAH YASIN**